

PERANAN PEKAN KEBUDAYAAN ACEH (PKA) KE IV DAN V DALAM MEMBANGKITKAN KEBUDAYAAN ACEH: (STUDI KASUS TARI SAMAN DAN SEUDATI)

Aulia Rahman dan Syarifah Fathia Fairuz

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Samudra, Langsa

email : auliarahman1985@yahoo.com

Abstraksi

Aceh merupakan sebuah daerah yang multi kultural, multi etnik, agama, ras dan golongan. Akibat dari percampuran ini melahirkan kemajemukan budaya. Salah satu bagian dari kebudayaan yang menjadi warisan turun temurun adalah kesenian. Menilik perjalanan kesenian Aceh, seni tari merupakan seni budaya yang sangat menarik karena memperlihatkan kekhasannya tersendiri yang tidak menyimpang dari ciri-ciri kepribadian masyarakat Aceh yang islami. Tari saman yang berasal dari Gayo dan tari seudati merupakan satu dari sekian banyak bukti kemegahan seni tari Aceh yang dilakukan secara bersama penuh makna dan atraktif. Uniknyanya kedua tarian ini tidak menggunakan alat musik. Melalui kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) diharapkan berbagai kekayaan seni budaya Aceh dapat diperkenalkan kepada dunia dan sekaligus dapat dilestarikan keberadaannya.

Tulisan akan membahas mengenai Peranan PKA, khususnya PKA Ke IV Dan V Dalam Membangkitkan Kebudayaan Aceh (Studi Kasus Tari Saman Dan Seudati).

Kata Kunci: Aceh, Kebudayaan, PKA.

Pendahuluan

Aceh dikenal sebagai masyarakat yang berbudaya. Hal ini tercermin di dalam ungkapan *matee aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita*. Ungkapan ini merupakan suatu pernyataan yang mempunyai nilai-nilai filosofis yang perlu direnungkan. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat masyarakat Aceh merupakan bagian dari sisi budaya yang hidup dan berkembang di Aceh. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya di Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya Aceh lebih dikenal dengan sebutan adat Aceh. Menurut Ali (2013: 14) "penamaan adat dalam konteks budaya

Aceh, memberi makna budaya Aceh dijiwai oleh nilai-nilai islami yang tidak boleh lepas sebagai akar tunggalnya untuk berkreasi membangun tatanan kehidupan masyarakat Aceh".

Aceh merupakan sebuah daerah yang multi kultural, multi etnik, agama, ras dan golongan. Akibat dari percampuran ini melahirkan kemajemukan budaya yang mengantarkan kepada perbedaan sebagai pelaksanaan sikap perilaku berbagai kelompok masyarakat di seluruh Aceh. "...pengertian kebudayaan itu sendiri bergantung pada aspek kehidupan masyarakat secara teoritis yang dianggap pokok untuk pemahaman perilaku warga masyarakat" (Ali, 2013:12).

Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta "buddhayah", yaitu bentuk jamak dari "buddhi" yang berarti "budi"

atau "akal" (Koentjaraningrat, 2013:146). Menurut definisi kebudayaan adalah "hasil kegiatan dan penciptaan bathin (akal budi) manusia (seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat)" (Sugono, dkk, 2008:226). Dalam ilmu antropologi, "kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar" (Koentjaraningrat, 2013:144).

Definisi tersebut secara eksplisit mengatakan bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya sedikit tindakan dan perilaku manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang tidak dibiasakan dengan belajar, seperti tindakan naluri, beberapa refleksi, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakukan membabi buta.

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (dulunya "Daerah Istimewa Aceh") merupakan salah satu propinsi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. "berada di ujung pulau sumatera dibagian paling barat negara Republik Indonesia, terletak antara 95° – 98° Bujur Timur dan 2° – 6° Lintang Utara" (Umar, 2008:1). Penduduknya terdiri dari beragam suku bangsa, yaitu suku bangsa Aceh, suku bangsa Alas, suku bangsa Aneuk Jamee, suku bangsa Gayo, suku bangsa Kluet, suku bangsa Simeuleue, suku bangsa Singkil dan suku bangsa Tamiang. Setiap ragam suku bangsa tersebut mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri-ciri tersebut dapat diamati dalam pergaulan masyarakat Aceh keseharian yang terangkum di dalam adat dan budayanya.

Salah satu bagian dari kebudayaan yang menjadi warisan turun temurun

adalah penggal budaya berupa karya kesenian.

Dalam konteks Aceh, kesenian sebagai bagian dari kebudayaan tidak terlepas dari nilai-nilai tradisi masyarakatnya. Seni yang dimaksud adalah kemampuan seseorang atau sekelompok untuk menampilkan hasil karya di hadapan orang lain. Dalam konteks masyarakat Aceh dahulu, seseorang yang mempunyai nilai seni, maka ia akan menjadi sosok yang akan menjadi perhatian (Ulfa, 2011:2)

Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat Aceh selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam semenjak kerajaan-kerajaan kecil di masa silam sampai mencapai kegemilangannya di masa pemerintahan Iskandar Muda (1607 – 1636) hingga kini. Nilai-nilai ini memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai ini pulalah sehingga propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendapat julukan "Seramoe Mekkah" atau Serambi Mekkah. "Sejarah penyebutan Aceh sebagai Serambi Mekkah bukan merupakan sebuah peristiwa, tetapi sebuah ungkapan dari orang-orang banyak sebagai suatu apresiasi terhadap Aceh yang begitu gigih mengembangkan dan mempertahankan Islam sebagai suatu agama yang suci" (Amiruddin, 2008:69).

Dari berbagai budaya yang ada di Aceh, seni tari merupakan salah satu budaya yang sangat menarik karena memperlihatkan kekhasannya tersendiri yang tidak menyimpang dari ciri-ciri kepribadian masyarakat Aceh yang islami dan tidak menyimpang dari spirit keislaman. Nuansa Islam ini pula yang membaaur dan menyatu dalam kebudayaan

asli orang Aceh sehingga aktifitas kesenian Aceh kerap bernafaskan Islam.

Satu bentuk upaya untuk melestarikan, budaya Aceh agar tidak hilang tercuci oleh zaman, pemerintah propinsi Aceh menggelar suatu perhelatan atau festival kebudayaan yang dinamakan dengan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA). Perhelatan kebudayaan ini disambut hangat oleh masyarakat Aceh. Masyarakat merindukan kebesaran budaya indatunya yang nyaris hilang setelah sekian lama terpendam akibat sejarah Aceh yang suram dirundung oleh konflik.

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan paparan di atas adalah, Bagaimanakah peranan PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) ke IV dan V dalam membangkitkan kebudayaan Aceh khususnya tari saman dan seudati?

Pembahasan

Dinamika Kebudayaan Aceh

Dinamika sebuah kebudayaan yang tentu saja selalu mengalami pergeseran sehingga disebut dinamika (selalu berubah). Suatu peristiwa atau fenomena kebudayaan sebagai proses yang sedang berjalan atau bergeser disebut dinamika kebudayaan. Kebudayaan dan kesenian merupakan bagian integral dari tata laku peradaban masyarakat Aceh, dengan sendirinya terbawa arus perubahan itu. Eksistensi dan essensi para pekerja seni dan budayawan berbau dalam dinamika yang begitu cepat mengalami perubahan. Dalam konteks ini, kesenian melalui senimannya, kebudayaan melalui budayawan, mau tidak mau harus mampu memformulasikan eksistensinya dari perubahan, baik secara makro maupun secara mikro. Kearifan lokal yang merupakan konsideran trasedental bagi seniman dan budayawan diharapkan

mampu memperkokoh kemandirian masyarakat dalam arus perubahan itu.

Pengayaan nurani yang merupakan basis dari perubahan tata laku, terlalu mahal untuk dipertaruhkan dengan pragmatisme yang begitu deras mendesak nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Penguatan terhadap seniman dan budayawan itu, pada akhirnya dapat diharapkan menjadi motor penggerak kebudayaan bagi masyarakat Aceh. Regulasi yang diharapkan mampu memayungi keberlanjutan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan berbasis peningkatan kapasitasnya, terlalu lambat mengejar pragmatisme yang mulai merasuk ke nurani rakyat.

Seni dan budaya dan nilai-nilai *transendental* (menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian) pada akhirnya harus mereposisi dan reorientasi untuk merumuskan manifesto kebudayaan Aceh masa depan, sesuai dengan nilai-nilai substansi Islam dan kemanusiaan universal. Sehingga nantinya kesenian dan kebudayaan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kearifan lokal menjadi spirit dalam meletakkan pondasi pembangunan berkelanjutan yang berbudaya.

Kebudayaan dalam manifestasi keillahian yang dilakoni masyarakat Aceh dalam berbagai situasi telah terbukti ampuh memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam arus perubahan. Berbagai karya seni yang mengalir ruh kehidupan masyarakat Aceh telah berkembang di tengah arus perubahan itu sendiri. Kemunculan berbagai penyair, sanggar, kelompok seni, pelukis dan lain sebagainya telah menambah denyutan bagi perkembangan seni di Aceh. Demikian juga dengan banyaknya kegiatan kesenian baik yang bertaraf lokal dan nasional

tentunya menambah nuansa lain dari perkembangan itu. Dialog-dialog seni dan kebudayaan baik yang dilakukan secara formal dan informal, tentunya telah memperkaya alur pikir seniman dan masyarakat.

Di samping itu telah terjadi lompatan yang luar biasa dilakukan seniman Aceh pasca konflik dan bencana tsunami. Ini ditandai dengan banyaknya karya seni yang telah dipublikasikan secara kontinyu. Hal yang patut disyukuri juga antara lain dengan dibangunnya gedung-gedung kesenian yang ada diberbagai kabupaten dan kota di negeri tercinta ini. Namun kesemuan dalam berkesenian menjadi kekhawatiran yang patut dicermati secara cerdas. Karena kekuatan seni diharapkan mampu memberi warna dalam perubahan yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Realita ini tentunya menuntut konsistensi dari pesan yang mengalir melalui karya seni yang ada. Konsistensi karya seni akan menjadi hambar dan semu bila tidak tereduksi dalam kebijakan. Situasi ini tentunya tidak menjadi harapan kita semua yang mengagungkan kesenyawaan *adat bak po teu meuruhom, hukum bak syiah kualah. Adat ngon hukom lagee dzat ngon sifet*. Masyarakat Aceh benar-benar menghayati ajaran agama Islam dalam kehidupannya. Penghayatan yang begitu besar dan mendalam terhadap ajaran agama Islam diwujudkan dalam bentuk akulturasi antara adat dan ajaran agama. Menurut Muhammad (2003:175), "di Aceh adat budaya itu searah dan relevan dengan ketentuan agama".

Menurut Darwis A. Sulaiman, Aceh merupakan daerah yang kaya budaya, dan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang berbudaya. Pada masa-masa kerajaan Aceh Darussalam

kebudayaan Aceh berkembang dengan pesat, baik dalam bentuk bahasa dan kesusasteraan maupun dalam bentuk seni dan ilmu pengetahuan. Baik adat maupun kebudayaan Aceh berakar pada nilai-nilai agama Islam (Puteh, 2012:81).

Menurut H.A.R. Tilaar (2002) dalam Rijal dan Ibrahim (2009:20), kebudayaan dipahami menyangkut semua potensi manusia yang digerakkan guna merespon berbagai tuntutan dari berbagai aspek kehidupan. Kebudayaan pada dasarnya merupakan segala macam bentuk gejala kemanusiaan, baik yang mengacu pada sikap konsepsi, ideologi, perilaku, kebiasaan, karya kreatif, dan sebagainya. Secara kongkret kebudayaan bisa mengacu pada adat istiadat, bentuk-bentuk tradisi lisan, karya seni, bahasa, pola interaksi, dan sebagainya. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan fakta kompleks yang selain memiliki keunikan pada batas tertentu juga memiliki ciri yang bersifat universal. Menurut Carol R. Ember dan Melvin Ember, "kebudayaan merupakan suatu penyesuaian pada lingkungan fisik dan kebutuhan-kebutuhan biologis. Kebudayaan juga merupakan suatu penyesuaian pada lingkungan" (Wibowo dan Ismail, 2008:125).

Aceh yang sebelumnya pernah disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009) adalah provinsi paling barat di Indonesia. Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, karena alasan sejarah. Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Ibu kota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhanya adalah Malahayati-Krueng

Raya, Ulee Lheue, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa.

Provinsi Aceh memiliki 13 buah bahasa asli yaitu bahasa Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai, Pakpak, Haloban, Lekon dan Nias. Sebagian besar penduduk di Aceh menganut agama Islam. Dari ke 13 suku asli yang ada di Aceh hanya suku Nias yang tidak semuanya memeluk agama Islam. Agama lain yang dianut oleh penduduk di Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang suku Batak dan sebagian warga Tionghoa yang kebanyakan bersuku Hakka.

Sedangkan sebagian lainnya tetap menganut agama Konghucu. Selain itu provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di provinsi ini Syariat Islam diberlakukan kepada sebagian besar warganya yang menganut agama Islam. Sejarah dan perkembangan suku bangsa Aceh juga menarik perhatian para antropolog seperti Snouck Hurgronje.

Dilihat dari sisi kebudayaannya, Aceh memiliki budaya yang unik dan beraneka ragam. Kebudayaan Aceh ini banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya melayu, karena letak Aceh yang strategis karena merupakan jalur perdagangan maka masuklah kebudayaan Timur Tengah. Beberapa budaya yang ada sekarang adalah hasil dari akulturasi antara budaya melayu, Timur Tengah dan Aceh sendiri. Suku bangsa yang mendiami Aceh merupakan keturunan orang-orang melayu dan Timur Tengah hal ini menyebabkan wajah-wajah orang Aceh berbeda dengan orang Indonesia yang berada di lain wilayah.

Corak kesenian Aceh memang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, namun telah diolah dan disesuaikan

dengan nilai-nilai budaya yang berlaku. Seni tari yang terkenal dari Aceh antara lain Seudati, Seudati inong, dan Seudati tunang. Seni lain yang dikembangkan adalah seni kaligrafi Arab, seperti yang banyak terlihat pada berbagai ukiran mesjid, rumah adat, alat upacara, perhiasan, dan sebagainya. Selain itu berkembang seni sastra dalam bentuk hikayat yang bernafaskan Islam, seperti Hikayat Perang Sabil.

Bentuk-bentuk kesenian *Aneuk Jamee* berasal dari dua budaya yang berasimilasi. Orang *Aneuk Jamee* mengenal kesenian Seudati, dabus (dabuih), dan ratoh yang memadukan unsur tari, musik, dan seni suara. Selain itu dikenal kaba, yaitu seni bercerita tentang seorang tokoh yang dibumbui dengan dongeng.

Suatu unsur budaya yang tidak pernah lesu di kalangan masyarakat Gayo adalah kesenian, yang hampir tidak pernah mengalami kemandekan bahkan cenderung berkembang. Bentuk kesenian Gayo yang terkenal, antara lain tari Saman dan seni teater yang disebut didong. Selain untuk hiburan dan rekreasi, bentuk-bentuk kesenian ini mempunyai fungsi ritual, pendidikan, penerangan, sekaligus sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan struktur sosial masyarakat. Di samping itu ada pula bentuk kesenian *bines*, guru didong, dan melengkap (seni berpidato berdasarkan adat), yang juga tidak terlupakan dari masa ke masa.

Walaupun benar bahwa unsur-unsur dari suatu kebudayaan tidak dapat dimasukkan ke dalam kebudayaan lain tanpa mengakibatkan sejumlah perubahan pada kebudayaan itu, namun harus diingat bahwa kebudayaan tidaklah bersifat statis ia akan selalu berubah. Tanpa adanya

gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur asing sekalipun suatu kebudayaan dalam masyarakat tertentu pasti akan berubah dengan berlalunya waktu.

Dalam sebuah seminar di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, Yusni Sabi mensinyalir bahwa ada tiga aspek dari nilai budaya Aceh yang sedikit-banyak telah dilupakan oleh masyarakatnya. Adapun aspek-aspek tersebut adalah aspek integritas, tatakrma, dan kedisiplinan. Erosi ini mungkin disebabkan oleh pengaruh luar ataupun pengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang dimaksud dengan pengaruh luar adalah bahwa sikap budaya Aceh telah bergeser karena adanya tekanan budaya luar Aceh yang melanda karena globalisasi yang tidak dapat dielakkan. Pengaruh dalam dapat terjadi ketika orang Aceh sendiri telah melunturkan nilai-nilai Ke-Acehannya yang disebabkan oleh mental orang Aceh itu sendiri yang tidak setia kepada budayanya (Wibowo, 2009:4).

Sejarah Munculnya PKA

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang majemuk (*pluralisme*). Orang Aceh sekarang adalah hasil dari percampuran dengan berbagai bangsa sebagai akibat dari proses sejarahnya yang panjang. Masuknya Islam ke Aceh memainkan peranan penting. Islam mengatur seluruh kehidupan yang mengacu kepada keridhaan Allah. Islam mengandung seluruh sistem dan tata cara hidup yang lengkap, yang berhubungan dengan derap langkah, aktivitas, dan setiap aspek perilaku manusia, sehingga Islam menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Aceh. Penghayatan terhadap agama Islam telah melahirkan sebagian adat istiadat

(kebudayaan) Aceh yang kental akan nuansa islami.

Penyesuaian adat istiadat dengan ajaran Islam berlangsung secara berangsur-angsur. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh A, Hasjmy bahwa: "Islam telah datang ke nusantara membawa *tamaddun*, kemajuan dan kecerdasan. Namun kedatangan Islam ke nusantara bukan dalam suatu vacuum peradaban, akan tetapi berhadapan dengan kebudayaan yang terlebih dahulu sudah berkembang yaitu pengaruh Hinduisme" (Puteh, 2012:143).

,....Abudin Nata menyebut kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat dan sebagainya. Kesemuanya itu selanjutnya digunakan oleh seseorang dalam menjawab berbagai masalah yang dihadapinya (Yusuf, 2013:38).

Dalam menghadapi era globalisasi, tantangan dalam kebudayaan semakin ketat. Perubahan dan pergeseran kebudayaan Aceh adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Ini merupakan gejala umum yang terjadi dalam setiap masyarakat sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan.

Ibrahim Hasan dalam sambutan tertulisnya sebagai Gubernur Aceh tahun 1991, menyebut kekhasan adat-budaya Aceh terletak pada nafas Islam yang terkandung di dalamnya. Pelestarian adat budaya Aceh amat tergantung pada sikap dan perilaku para pengikut dan pemakainya. Banyak adat dan budaya menjadi hilang karena masyarakatnya tidak memeliharanya lagi. Sebaliknya adat

istiadat dan kebudayaan sesuatu masyarakat akan terus lestari dan berkembang ditengah-tengah kaum yang mencintainya...(Yusuf, 2013:38)

Pergeseran dan perubahan kebudayaan sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan suatu bangsa. Pergeseran dan perubahan ini juga terjadi di kalangan masyarakat Aceh.

Menurut Tim Peneliti IAIN Ar Raniry Dan Biro Keistimewaan Aceh,..., perubahan sosial budaya akan berjalan dengan baik jika faktor-faktor pendukung juga menopang gerakan tersebut. Faktor-faktor yang paling menentukan tersebut di antaranya adalah pendidikan, tatanan ekonomi dan stabilitas politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya masyarakat dan keinginan pemerintah untuk melakukan perubahan ini. Sebab semua aspek saling terkait satu sama lain, pendidikan mempengaruhi keadaan ekonomi, stabilitas politik berdampak terhadap perkembangan budaya, serta budaya mempunyai efek terhadap perubahan sosial, begitupun sebaliknya (Puteh, 2012:117-118).

Dewasa ini sudah banyak di kalangan masyarakat Aceh khususnya generasi muda yang tidak mengetahui keragaman kebudayaan Aceh yang kaya nilai-nilai religius (memiliki identitas Islam) sehingga melahirkan sikap masa bodoh akibat kurangnya pemahaman terhadap adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Banyak hal yang dahulu dianggap sakral dalam adat istiadat, tetapi saat ini telah menjadi hal yang biasa. Misalnya adat membangun rumah, adat pergaulan, adat perkawinan, adat berpakaian, dan lain sebagainya.

Jika diamati lebih jauh lagi, masyarakat Aceh saat ini seakan-akan sedang berubah secara drastis dari masyarakat yang penuh dengan tatanan

adat istiadat menjadi masyarakat *hedonistis* atau yang memandang kesenangan dan kenikmatan material sebagai tujuan utama hidup ini. "Prof Ali Hasjmi sekitar tahun 1980-an, beliau pernah mengucapkan suatu pernyataan: *mengenang kejayaan masa lalu berbahaya pada masa kini, jika kita tidak siap menghadapi masa depan*" (Yusuf, 2013:39). Pernyataan ini merupakan suatu peringatan bagi masyarakat Aceh apabila pelestarian kebudayaan tidak dilakukan, dikhawatirkan kebudayaan Aceh akan hilang akibat tekanan dari luar (kebudayaan asing)

Telah digariskan dalam GBHN bahwa nilai budaya Indonesia dibina dan dikembangkan guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan nasional, dan bahwa pembinaan kesenian daerah ditingkatkan dalam rangka mengembangkan kesenian nasional agar dapat lebih memperkaya kesenian Indonesia yang beraneka ragam, serta demikian pula bahwa tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk, memperkaya dan memberi gerak pada kebudayaan nasional.

Usaha pelestarian kebudayaan di Aceh telah dilaksanakan dalam bentuk pekan kebudayaan yang pelaksanaannya dilakukan secara bersinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Pekan kebudayaan merupakan suatu sarana pembangunan seni budaya dan pembangunan masyarakat Aceh. "Seni budaya dapat dipahami sebagai aspek pengungkapan rasa keindahan manusia yang merupakan aktifitas dari bahagian suatu kebudayaan" (Rijal dan Ibrahim,

2009:21). Seni budaya merupakan salah satu segi pembangunan yang memberi pengaruh langsung kepada pembangunan manusia. Pembangunan manusia menyangkut upaya perubahan sikap dan pola pikir dari seseorang ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Kualitas kepribadian manusia sebagai individu itu merupakan syarat bagi terbentuknya masyarakat yang berkualitas pula. Masyarakat Aceh, sebagaimana masyarakat manusia di manapun, terus berubah dan sedang mengalami proses transformasi sebagai akibat dari perubahan zaman dan perubahan kehidupan. Dengan mengembangkan seni budaya dan dengan meningkatkan kepribadian masyarakat Aceh, sesungguhnya telah tercakup makna bahwa PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) merupakan sarana pembangunan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat positif yang terkandung dalam adat dan kebudayaan Aceh dapat dijadikan motivasi untuk membangun, karena itu nilai-nilai kehidupan tersebut perlu digali kembali serta dikembangkan.

Secara eksplisit dinyatakan juga bahwa PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) merupakan sarana pembangunan daerah Aceh di bidang ekonomi. Dengan kegiatan keseniannya diharapkan dapat menarik wisatawan datang ke Aceh. Terbukanya daerah Aceh bagi wisatawan dapat diharapkan memberi dampak penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Namun kesempatan ini hanya dapat terlaksana apabila tersedianya kondisi-kondisi sosial budaya yang beretika, berestetika dan orisinal.

Adapun yang menjadi landasan diselenggarakannya PKA adalah falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu dalam konteks daerah, maka keistimewaan Aceh (dalam

bidang agama, adat dan pendidikan). Tujuan yang ingin dicapai oleh Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ialah tujuan edukatif, yaitu mengembangkan kepribadian masyarakat Aceh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dari sebelumnya, yang memiliki martabat dan harga diri.

Tujuan edukatif dimaksud agar putra putri Aceh merasa dirinya tertinggal dalam berbagai lapangan, khususnya lapangan pendidikan dan kebudayaan, dan alpa dalam pembangunan. Karena itu dengan PKA diharapkan agar dapat membawa kebaikan bagi putra putri Aceh seluruhnya. Dalam setiap pelaksanaan PKA tujuan edukatif ini selalu mendapat tekanan yang lebih tegas lagi serta dinyatakan secara eksplisit dan terperinci.

Perkembangan PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) dari Masa ke Masa

Dalam laporan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (1991:31-38) dijelaskan mengenai perkembangan PKA sebagai berikut:

PKA pertama. Ide PKA-I ini awalnya dicetuskan oleh Nyak Yusda (saat itu Kepala SMEA 1958 di Kuta Raja/Banda Aceh) saat mengadakan perbincangan dengan beberapa temannya. Hasil perbincangan ini kemudian disampaikan kepada Mayor T. Hamzah (Kepala Staf Penguasa Perang Daerah) yang mendapat tanggapan positif. Selanjutnya menemui gubernur A. Hasjmy yang juga mendapat sambutan yang positif. Tidak lama kemudian terbentuklah panitia PKA-I.

Ide PKA (Pekan Kebudayaan Aceh)-I demikian cepat berkembang didasarkan kepada beberapa motivasi saat itu. Di antaranya:

Pertama, telah timbul upaya untuk mewujudkan keamanan dan

pembangunan kembali daerah Aceh setelah berlangsungnya peristiwa DI/TII pada tahun 1950-an. Serentetan usaha kearah itu dilakukan (Pemuda dan masyarakat) yang berada di luar Aceh. Misalnya, masyarakat dan mahasiswa Aceh di Bandung – yang tergabung dalam IPS (Ikatan Pemuda Seulahah) mengadakan Kongres Pelajar/Mahasiswa Aceh pada tahun 1956 di bawah pimpinan AK Yacoby di Jakarta. Pada tahun yang sama (1956) dilakukan pula Kongres Kilat Masyarakat Aceh yang dipimpin oleh Nyak Husda. Demikian pula pada tahun 1957 diadakan Kongres Masyarakat Aceh di Medan di bawah pimpinan Nur Nekmat dan Said Ibrahim. Tahun itu juga para Pemuda Pejuang Aceh yang tergabung dalam Divisi Gajah Putih mengadakan Reuni di Yogyakarta. Pertemuan itu telah memberikan andil bagi memulihkan keamanan dan pembangunan kembali daerah Aceh.

Kedua, pada masa itu tanah air sedang berkembang upaya memperkaya kebudayaan nasional melalui pengembangan kebudayaan daerah.

Ketiga, Motivasi yang timbul oleh kenyataan sejarah masa lampau bahwa daerah Aceh kaya budaya. Sehingga ide mengadakan PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) disambut hangat oleh masyarakat yang telah merindukan menghidupkan dan melestarikannya kebesaran budaya indatunya, terutama adat dan kesenian, yang nyaris hilang setelah sekian lama terpendam dan hilang akibat sejarah Aceh yang suram dirundung oleh konflik.

Kerinduan membangun kembali kebudayaan Aceh terangkum dalam piagam “Adat bak Poe teumeurohom, Hukom bak Syiah Kuala”. Hal itu menjadi tema PKA (Pekan Kebudayaan Aceh)-I, yang saat itu diketuai oleh Mayor T. Hamzah. Acara pembukaan PKA (Pekan

Kebudayaan Aceh)-I ini berlangsung di Gedung Balai Teuku Umar pada tanggal 12 Agustus 1958 dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Prijono, yang juga sekaligus menutup acara ini pada tanggal 23 Agustus 1958.

PKA (Pekan Kebudayaan Aceh)-I pertama telah memberi bias positif bagi perkembangan Aceh. Sebab selain berhasil mengangkat kembali sejumlah adat dan kesenian tradisional Aceh, juga terwujudnya tujuan-tujuan lain yang selaras, yaitu terbentuknya Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Ketika itu telah dapat digali dan dihidupkan kembali sekitar 20 buah tarian tradisional Aceh dan beberapa tari kreasi baru, termasuk tari Ranub Lampuan dan tari Punca Utama.

Pagelaran adat dari berbagai etnis lokal ditampilkan. Seperti adat perkawinan, perdamaian, bereles (sunat rasul), Imah Ku Wih (turun mandi) yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Aceh Tengah. Berbagai macam permainan, seperti meuen gaseng, meuen galah, sepak raga, panza, geude-geude, tarian Saman (tarian asli Aceh Tenggara), Ratoh yang berasal dari Padang Tiji Pidie, tari Landak Sampot, tari Guel berhasil diangkat kembali. Yang paling penting lagi terwujudnya cita-cita rakyat untuk membangun kembali pendidikan di Aceh, yang ditandai oleh berdirinya Kopelma Darussalam pada tahun 1959.

PKA IV

Setelah mengakhiri masa penantian yang begitu lama, kurang lebih 16 tahun. PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) IV dilaksanakan pada tanggal 19 – 28 Agustus 2004. Pembukaan PKA IV dilakukan oleh Presiden Megawati. Adapun lokasi pelaksanaan PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) ini Taman Sulthanah Safiatuddin.

Taman ini berada persis di belakang kantor Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dari kejauhan akan terlihat pemandangan dan suasana seperti di Taman Mini Indonesia Jakarta, walaupun yang menjadi perbedaan adalah lokasinya tidak begitu luas.

Pada PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) IV ini telah terlaksana berbagai kegiatan, baik kegiatan yang berupa seminar maupun kegiatan non seminar, seperti atraksi budaya, pasar seni, pameran buku, pawai budaya, kenduri massal, dan sebagainya. Dapat dikatakan kegiatan PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) ini berlangsung sangat meriah apalagi pelaksanaan PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) IV dilaksanakan berbarengan dengan *event* Tahun Budaya.

PKA V

Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) V kembali digelar di Kota Banda Aceh pada 1-11 Agustus 2009. Berbagai kegiatan antara lain parade budaya, gebyar seni, seminar budaya, aneka lomba seni dan permainan rakyat, serta Aceh Expo untuk mempromosikan dan memasarkan paket wisata Aceh akan menyemarakkan PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) V. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono membuka PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) V yang dipusatkan di Taman Sulthanah Shafiatuddin Banda Aceh.

Dalam acara seminar budaya akan mengangkat tema menarik seperti Pandangan dan Pemikiran Ulama terhadap Pengembangan Budaya dan Pariwisata, Penggalan Sejarah, Seni, dan Warisan Budaya (dengan pembicara DR.Anhar Gonggong, DR. Mukhlis Paeni, Prof. A. D. Pirous, Christine Hakim, DR. Kamal A. Arief, dan Prof. DR. Irwan Abdullah), Perdamaian dalam Konteks Pelestarian

Budaya Aceh (pembicara tokoh perdamaian Aceh seperti Malik Mahmud al-Haitar, Sofyan Jalil, Hamid Awaluddin, LakSamana Widodo AS, Juha Christhensen, dan Prof.DR. Bahtiar Aly), serta Hubungan Budaya Melayu-Aceh (pembidara dari Malaysia/Patthany Thailand dan Melayu Indonesia).

Kegiatan PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) V yang mengangkat tema Satukan Langkah, Bangun Aceh dengan Tamadhun dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan peran serta dan apresiasi masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami, melestarikan keragaman budaya dalam memperkokoh kedamaian yang abadi di Aceh, serta meningkatkan peran serta masyarakat sekaligus mempromosikan adat dan produk budaya maupun pariwisata Aceh.

Masyarakat Aceh memiliki keistimewaan dalam agama, pendidikan, adat-istiadat serta peran ulama. Adat-istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini terlihat dalam ungkapan; *Matee aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita* (Mati anak tahu makamnya, hilang adat di mana dicari). Usaha pelestarian adat-istiadat di tingkat Provinsi Aceh terus ditingkatkan melalui Perda No.2/1990 yang mengatur pembinaan dan pengembangan adat-istiadat, kebiasaan masyarakat, serta lembaga adat. Penyelenggaraan PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) V dapat mendorong tumbuhnya motivasi dan daya cipta para seniman dan budayawan Aceh serta memperkokoh jati diri bangsa Indonesia, sehingga terwujudnya kedamaian Aceh yang hakiki.

Upaya Revitalisasi Budaya Aceh Melalui PKA

Dalam perjalanan sejarah Aceh tercatat ada tujuh tahap perkembangan peradaban Aceh yang mengarah pada penghancuran kebudayaan. Empat tahap pertama terjadi saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia hingga terjadinya pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia). Tiga tahap selanjutnya justru terjadi pada masa orde baru. Sebagaimana yang dilukiskan Nazaruddin:

Penghancuran peradaban Aceh berlangsung secara bertubi-tubi dalam duapuluh tahun terakhir ini dan dengan dampak pelanggaran hak asasi manusia dalam skala yang luar biasa. Hal ini diawali oleh lahirnya GAM yang membawa akibat penghancuran peradaban yang ketujuh. Ini diikuti dengan penghancuran peradaban yang kedelapan yang dipicu oleh pemberlakuan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM), yakni sebagai tanggapan keras pemerintah pusat atas aksi GAM. Masih dalam rangkaian ini terjadi proses penghancuran peradaban yang kesembilan, yaitu setelah berakhirnya pemberlakuan DOM. Proses yang terakhir ini antara lain ditandai oleh terjadinya pembunuhan-pembunuhan terhadap intelektual, politisi dan para ulama Aceh (Muhammad, 2003: xii).

Diakui atau tidak, bahwa secara objektif masyarakat Aceh sedang dikurung dan dihadapkan dalam sebuah realitas objektif yang penuh dengan masalah dan cukup kompleks. Nyaris disemua lini kehidupan, bersifat kontra produktif, dan kemudian menimbulkan krisis yang multi dimensi dan lintas sektor. Konflik dan pertentangan yang berlarut-larut seakan tidak putus-putusnya terjadi.

Terlepas dari faktor internal masyarakat budaya itu sendiri, dalam perjalanan perkembangan kebudayaan Aceh tidak terlepas dari berbagai pengaruh yang bisa saja menggerogoti nilai-nilai budaya. Walaupun pada dasarnya keberadaan faktor itu lebih sebagai hal yang positif, seperti faktor kemajuan ekonomi, teknologi (pertanian, kelautan, informasi, visualisasi, komunikasi), dan iklim politik (Dinas Kebudayaan, 2004:336)

Budaya merupakan bahasa yang luhur dari masyarakat. Budaya hakikatnya merupakan manifestasi cara berfikir atau buah karya manusia. Menurut Al Yasa' Abubakar (2013:211-212) kebudayaan akan berwujud dalam tiga bentuk: "wujud kebudayaan sebagai serangkaian gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya, wujud kebudayaan sebagai serangkaian aktivitas kelakuan berpola dari manusia ke dalam masyarakat, dan wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia". Dalam pandangan Junus Malalatoa, yang terpenting diantaranya adalah nilai atau nilai budaya (*culture value*) yang merupakan suatu konsepsi abstrak yang dianggap baik dan amat bernilai tinggi dalam hidup, yang menjadi pedoman tertinggi kelakuan dalam kehidupan satu masyarakat (Wibowo, 2009:136).

Perubahan nilai-nilai budaya Aceh selanjutnya dapat diamati secara *komprehensif* (lebih luas) dalam kondisi sosial, dimana di dalamnya telah tercakup berbagai perubahan dalam bidang keagamaan, moral, etika dan lainnya yang berkembang dalam bentuk perilaku masyarakat. Hal ini dapat ditandai dengan minimnya hal-hal yang tabu, bertentangan antara ucapan dan perilaku, merasa kuno dengan budaya sendiri dan merasa maju dengan budaya asing. Oleh karena itu

diperlukan tanggungjawab seluruh masyarakat Aceh untuk meluruskan keadaan, dimana satu sisi budaya harus mampu bersaing dengan kemajuan zaman, dan disisi lain nilai-nilai budaya tersebut harus dilestarikan.

Secara struktural, budaya Aceh kehilangan peran yang cukup penting di dalam masyarakat ketika diberlakukan Undang-Undang No 7 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini menghendaki penyeragaman tata pemerintahan di tingkat desa, yang berlatar belakang beranekaragamnya budaya etnik. Akibatnya, struktur masyarakat gampong di Aceh menjadi runyam. Peranan *tuha peut*, *geuchik*, dan *imuem meunasah* menjadi kabur. Pada hal, mereka adalah benteng dari budaya Aceh. Penodaan terhadap peran yang dimiliki oleh benteng budaya Aceh tersebut membuatnya kehilangan makna di dalam diri *ureung* Aceh (Wibowo, 2009:145).

Ditinjau dari pelaksanaannya, PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) merupakan sebuah festival kebudayaan yang didalamnya menggambarkan keberhasilan daerah (kabupaten/kota) Aceh dalam melestarikan budaya yang dimilikinya, yang dipusatkan di ibukota propinsi. Suatu bangsa yang melaksanakan pembangunan fisik semata-mata tanpa berlandaskan pada kebudayaannya (pembangunan yang tidak berbudaya) akan memberikaan dampak negatif terhadap identitas dan jati diri dari masyarakat yang dibangun. Oleh karenanya revitalisasi budaya perlu dilakukan dan menjadi prioritas di dalam pelaksanaan pembangunan di Aceh.

Secara sederhana, "kata *revitalisasi* bermakna membuat agar lebih hidup dan lebih giat kembali" (Sugono, dkk, 2008:1206). Revitalisasi budaya dapat dimaknai sebagai "upaya yang terencana,

berkesinambungan dan bertujuan agar nilai-nilai budaya itu bukan hanya dipahami oleh para pemiliknya, melainkan juga membangkitkan segala wujud kreativitas dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam menghadapi berbagai tantangan di abad globalisasi kini" (Putra, 2013:1).

Abad ke 21 atau biasa disebut era globalisasi ditandai oleh kebebasan dan keterbukaan. Era ini menjanjikan berbagai harapan yang sarat dengan peluang positif yang dapat dimanfaatkan. Abad ini juga merupakan abad yang menakutkan, karena aneka ragam tantangan yang dapat merusak peradaban manusia. Karena itu upaya penangkalan terhadap kecenderungan ini harus dilakukan. Disinilah pemahaman dan pengamalan nilai budaya penuh kesadaran menjadi sangat penting.

PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) merupakan festival yang menyimpan sejarah peradaban Aceh. Menurut sejarah, pelaksanaan PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) untuk mengembalikan identitas, harkat, dan martabat budaya Aceh yang sempat terabaikan. Pelaksanaan pekan kebudayaan mempunyai hubungan positif terhadap upaya revitalisasi kebudayaan Aceh. Pekan Kebudayaan Aceh telah dilakukan sebanyak enam kali, yaitu PKA (Pekan Kebudayaan Aceh)-I tahun 1958 hingga pelaksanaan PKA (Pekan Kebudayaan Aceh)-VI tahun 2012 yang telah memberikan gambaran nyata terhadap keberhasilan daerah Aceh dalam mengangkat nilai-nilai budaya kepermukaan dalam upaya merevitalisasi kebudayaannya. Upaya revitalisasi budaya dapat dilakukan melalui pelestarian budaya itu sendiri.

Sejak PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) dilaksanakan telah berhasil

mengangkat dan menghidupkan kembali sejumlah adat dan kesenian tradisional Aceh yang masih ada ataupun telah mulai hilang di masyarakat. Sejalan dengan peristiwa budaya ikut pula terbentuknya Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta terwujudnya cita-cita membangun kembali pendidikan di Aceh pada tahun 1959 yaitu berdirinya Kopelma (Kota Pelajar Dan Mahasiswa) Darussalam.

Berdasarkan hasil rumusan seminar budaya pada PKA (Pekan Kebudayaan Aceh)-IV langkah-langkah pelestarian nilai-nilai budaya tersebut dapat dilakukan melalui; (Dinas Kebudayaan, 2004:338).

1. Inventarisasi nilai.
2. Perlunya pemaknaan ulang nilai budaya, agar tidak terjadi paradok (bertentangan dengan pendapat umum), dan pengisian nilai-nilai keislaman atas ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.
3. Proses pemaknaan kembali dan penyaringan nilai-nilai yang relevan memerlukan penela'ahan arah perubahan sosial oleh seluruh masyarakat baik tua maupun muda.
4. Hendaknya ada sekelompok ahli yang berinisiatif untuk melestarikan dan mensosialisasikan melalui pertimbangan media dan objek yang tepat seperti oleh pemerintah daerah, cendikiawan dan budayawan
5. Kerjasama yang simultan (serempak) antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Wibowo (2009:150-152) revitalisasi budaya Aceh dapat dilakukan melalui upaya-upaya berikut:

Pertama, perlunya perubahan pola pikir (*mainset*) dari semua komponen masyarakat dalam memandang kebudayaan. Selama ini terdapat pemikiran bahwa kebudayaan bukan suatu hal yang

sangat penting. Budaya dipinggirkan oleh berbagai pihak. Bicara kebudayaan dianggap suatu yang kuno atau kolot. Padahal budaya merupakan jati diri dari suatu bangsa.

Kedua, pembuatan Undang-undang/Qanun yang menjamin keberadaan budaya Aceh di dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, menyediakan ruang publik sebagai upaya melestarikan budaya masyarakat. Ruang publik ini dapat berupa museum dan taman mini (dalam hal ini arena Pekan Kebudayaan Aceh). Penyediaan ruang publik ini sebagai upaya pelestarian budaya dan ruang pameran, baik bagi masyarakat Aceh dan maupun bagi masyarakat dari luar Aceh.

Keempat, budaya Aceh disosialisasikan melalui media pendidikan. Untuk itu, hendaknya budaya dijadikan mata pelajaran muatan lokal sehingga pengetahuan, persepsi, keyakinan, sikap anak-anak terhadap budaya aceh semakin baik. Hal ini juga untuk membentengi anak-anak Aceh dari pengaruh luar yang negatif, sehingga mereka tidak kehilangan roh keacehannya.

Kelima, pembentukan lembaga-lembaga yang melestarikan dan mensosialisasikan keberadaan budaya Aceh. Pendirian lembaga-lembaga ini juga harus didukung oleh kerjasama yang baik di antara lembaga-lembaga yang bergerak dibidang kebudayaan dan *stakeholder* (pemilik modal).

Keenam, penyediaan dana yang cukup dalam upaya melaksanakan pembangunan dibidang kebudayaan. Tanpa dana yang cukup, kebudayaan tetap menjadi suatu yang terpinggirkan. Penyediaan dana harus mendapat dukungan dari pihak legislatif dan yudikatif di Pemerintahan Propinsi

Nanggroe Aceh Darussalam (kini Propinsi Aceh).

Keberagaman dan Kekuatan Budaya Aceh

Sejarah menunjukkan bagaimana rakyat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman dan ulama pun mendapat tempat yang terhormat. Penghargaan atas keistimewaan Aceh dengan syariat Islamnya itu kemudian diperjelas dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam UU No.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, tercantum bahwa bidang *al-syakhsiyah* (masalah kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, warisan, perwalian, nafkah, pengasuh anak dan harta bersama), *mu`amalah* (masalah tatacara hidup sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam), dan jinayah (kriminalitas) yang didasarkan atas syariat Islam diatur dengan qanun (peraturan daerah). Undang-undang memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Sekalipun begitu, pemeluk agama lain dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Keanekaragaman seni dan budaya menjadikan provinsi ini mempunyai daya tarik tersendiri. Dalam seni sastra, provinsi ini memiliki 80 cerita rakyat yang terdapat dalam Bahasa Aceh, Bahasa Gayo, Aneuk Jame, Tamiang dan Semelue. Bentuk sastra lainnya adalah puisi yang dikenal dengan hikayat, dengan salah satu hikayat yang terkenal adalah Perang Sabi (Perang Sabil).

Menurut Ali (2013:12), kemajemukan budaya/adat istiadat dalam

konteks masyarakat merupakan pengertian yang majemuk pula, pengertian kebudayaan itu sendiri bergantung pada aspek kehidupan masyarakat secara teoritis yang dianggap pokok untuk pemahaman perilaku warga masyarakat.

Provinsi Aceh memiliki 13 buah bahasa asli yaitu bahasa Aceh, Gayo, Aneuk Jamee, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai, Pakpak, Haloban, Lekon dan Nias. Sebagian besar penduduk di Aceh menganut agama Islam. Dari ke 13 suku asli yang ada di Aceh hanya suku Nias yang tidak semuanya memeluk agama Islam. Agama lain yang dianut oleh penduduk di Aceh adalah agama Kristen yang dianut oleh pendatang suku Batak dan sebagian warga Tionghoa yang kebanyakan bersuku Hakka. Sedangkan sebagian lainnya tetap menganut agama Konghucu. Selain itu provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di provinsi ini Syariat Islam diberlakukan kepada warganya yang menganut agama Islam. Sejarah dan perkembangan suku bangsa Aceh juga menarik perhatian para antropolog seperti Snouck Hurgronje.

Dilihat dari sisi kebudayaannya, Aceh memiliki budaya yang unik dan beraneka ragam. Kebudayaan Aceh ini banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya melayu, karena letak Aceh yang strategis karena merupakan jalur perdagangan maka masuklah kebudayaan Timur Tengah. Beberapa budaya yang ada sekarang adalah hasil dari akulturasi antara budaya melayu, Timur Tengah dan Aceh sendiri. Suku bangsa yang mendiami Aceh merupakan keturunan orang-orang melayu dan Timur Tengah, hal ini menyebabkan wajah-wajah orang Aceh berbeda dengan orang Indonesia yang berada di lain wilayah.

Corak kesenian Aceh memang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, namun telah diolah dan disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku. Seni tari yang terkenal dari Aceh antara lain Seudati, Seudati inong, dan Seudati tunang. Seni lain yang dikembangkan adalah seni kaligrafi Arab, seperti yang banyak terlihat pada berbagai ukiran mesjid, rumah adat, alat upacara, perhiasan, dan sebagainya. Selain itu berkembang seni sastra dalam bentuk hikayat yang bernafaskan Islam, seperti Hikayat Perang Sabil.

Seni tari Aceh juga mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri, dengan ciri-ciri antara lain pada mulanya hanya dilakukan dalam upacara-upacara tertentu yang bersifat ritual bukan tontonan, kombinasinya serasi antara tari, musik dan sastra, ditarikan secara massal dengan arena yang terbatas, pengulangan gerakan monoton dalam pola gerak yang sederhana dan dilakukan secara berulang-ulang, serta waktu penyajian relatif panjang. Tari-tarian yang ada antara lain Seudati, Saman, Rampak, Rapai, dan Rapai Geleng. Tarian terakhir ini paling terkenal dan merupakan perpaduan antara tari Rapai dan Tari Saman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa'. (2013). *Dinul Islam Dalam Budaya Aceh Yang Sedang Berubah: Implementasi Di Tingkat Gampong. Dalam Kumpulan Makalah Seminar Temu Budaya Pekan Kebudayaan Aceh Ke-6.* Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh.
- Ali, Faisal. (2013). *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariat Dan Adat.* Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh
- Amir, Iwan Dzulvan. (2006). *Seni Dalam Perspektif Keacehan.* Banda Aceh: Satker BRR Revitalisasi Dan Pengembangan Kebudayaan NAD.
- Amiruddin, M. Hasbi. (2008). *Aceh Dan Serambi Makkah.* Banda Aceh: Pena
- Ara, LK. (2009). *Ensiklopedi Aceh Music, Tari, Teater, Seni Rupa.* Banda Aceh: Yayasan Mata Air Jernih Dan Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh.
- Bahry, Rajab, dkk. (2005). *Tari Saman, Sejarah Pelaksanaan Dan Nilai Dalam Syairnya.* Banda Aceh: Balai Bahasa Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dinas Kebudayaan, (2004). *Laporan Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh Ke-4.* Banda Aceh: Dinas

- Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh. (2013). *Laporan Pekan Kebudayaan Aceh Ke-6*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh.
- Koentjaraningrat, (2013). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusjdi Ali. (2003). *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh. Problem, Solusi Dan Implementasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Nazir, Moh. (2011) *Metodelogi Penelitian*. Ciawi-Bogor: Ghali Indonesia.
- Pemerintah Daerah Prop. Daerah Istimewa Aceh. (1991). *PKA-3 Menjenguk Masa Lampau Menjangkau Masa Depan Kebudayaan Aceh*. Banda Aceh: Pemerintah Daerah Prop. Daerah Istimewa Aceh
- Puteh, Jakfar. M. (2012). *Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media
- Rijal, Syamsul dan Ibrahim, Iskandar. (2009). *Implementasi Syariah Dalam Seudati Aceh*. Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh
- Sugono, Dendy. dkk. (2008) *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Ulfa, Amelia mutia. (2011). *Macam-Macam Tarian Suku Aceh Dan Suku Gayo Yang Tredapat Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. *Skripsi*. Jurusan Sastra Asia Barat. Fakultas Ilmu Budaya Niversitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Umar, Muhammad (2008). *Darah Dan Jiwa Aceh, Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Boebon Jaya.
- Wibowo, Agus Budi. (2009). *Kompilasi Sejarah Dan Budaya Aceh*. Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.
- Wibowo, Agus Budi Dan Ismail, Muzakir. (2008). *Dunia Pariwisata Aceh*. Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Yusuf, M. Jamil. (2013). *Implementasi Budaya Aceh Dalam Era Globalisasi Dalam Kumpulan Makalah Seminar Temu Budaya Pekan Kebudayaan Aceh Ke-6*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh.
- Yulian, (2011). *Ensiklopedia Seni Budaya Dan Keterampilan*. Jakarta: Multazam Mulia Utama.